

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal.

Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain; keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur, Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara dalam hal ini pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi komunikasi dan informatika tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Kominfo maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Jawa Timur.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara

efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua SKPD.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai SKPD yang membidangi kominfo, maka disusunlah Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu (5) lima tahun kedepan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2014 s/d 2019 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (selanjutnya disebut Perda Prov Jatim) Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Sebagai pedoman arah pembangunan dibidang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2014 s/d 2019.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Review Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur tahun 2014 s/d 2019 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan Renstra.
2. Mewujudkan sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur terhadap program dan kegiatan tahun 2014 s/d 2019.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Review Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi dan dengan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Kominfo, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kominfo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kominfo.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Kominfo, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

Berisi mengenai Visi dan Misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berisi mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berisi indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur.

BAB VII P E N U T U P

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. JATIM

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMINFO PROV. JATIM

Sesuai dengan Pergub Prov. Jawa Timur Nomor : 83 Tahun 2008 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur;

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian Dan Seksi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dijabarkan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
3. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur;

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur;
5. Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah terhubungnya dua system elektronik atau lebih yang bersifat tertutup ataupun terbuka;
6. Konfigurasi adalah susunan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang terpadu dan terintegrasi untuk menghasilkan suatu kinerja;
7. Telematika (telekomunikasi, media dan informatika) adalah merupakan sinergi antara teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang diarahkan pada ketersediaan jaringan informasi dan data yang menghubungkan instansi pemerintah dalam rangka otomatisasi pelayanan umum;
8. Rekayasa adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk rancang bangun sistem yang ekonomis dan efisien;
9. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat, uang, barang dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang diselenggarakan oleh badan yang ditugasi menyelenggarakan pos dan giro;
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
11. Filateli adalah aktivitas mengumpulkan prangko dan benda-benda pos lainnya;
12. Telekomunikasi khusus adalah telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus;
13. Jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan paket, uang dan surat pos jenis tertentu dalam bentuk barang cetakan, surat kabar, sekogram, bungkus kecil kepada penerima dengan memungut biaya;
14. Informasi adalah hasil pengolahan data berupa yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakainya;
15. Perangkat keras adalah komponen fisik dari suatu sistem komputer;
16. Perangkat lunak adalah suatu program komputer yang mengaplikasikan urutan proses atau prosedur yang dilaksanakan oleh suatu piranti keras komputer;
17. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu istilah yang mencakup seluruh teknologi yang digunakan memproses suatu informasi;
18. Situs web adalah sekumpulan informasi yang mencakup grafis, suara, animasi dan efek khusus lain sebagai tambahan pada text dan bisa diakses

melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lain.

BAB II

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 2

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan Perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
 - j. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 4

(1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- d. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Sumpah / Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, dan tugas tata usaha kepegawaian lainnya;
- e. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- b. melaksanakan pengolahan data;
- c. melaksanakan perencanaan program;
- d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- g. melaksanakan penyusunan laporan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .

Bagian Kedua
Bidang Pengembangan Teknologi Informatika

Pasal 5

- (1) Bidang Pengembangan Teknologi Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengendalian serta pemeliharaan sarana prasarana Teknologi Informatika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Teknologi Informatika, mempunyai, fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan pedoman dalam rangka pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. pelaksanaan penyusunan kebutuhan dan konfigurasi perangkat keras, perangkat lunak dan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak ;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Bidang Pengembangan Teknologi Informatika, terdiri atas:
- a. Seksi Pengembangan Perangkat Lunak;
 - b. Seksi Pengembangan Perangkat Keras;
 - c. Seksi Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 7

- (1) Seksi Pengembangan Perangkat Lunak, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pengembangan perangkat lunak;
 - b. menyiapkan bahan analisis penggunaan dan perkembangan perangkat lunak;
 - c. menyiapkan bahan kebutuhan Perangkat Lunak;
 - d. menyiapkan bahan perencanaan pengembangan perangkat lunak;
 - e. menyiapkan bahan pertimbangan penggunaan/pemilihan Perangkat Lunak;

- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dalam rangka pengembangan perangkat lunak;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Perangkat Keras, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pengembangan perangkat keras;
 - b. menyiapkan bahan analisis penggunaan dan perkembangan perangkat keras;
 - c. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan perangkat keras dan sarana pendukung lainnya;
 - d. menyiapkan bahan pertimbangan penggunaan/pemilihan Perangkat Keras;
 - e. menyiapkan bahan spesifikasi kebutuhan perangkat keras dan sarana pendukung lainnya;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama pengembangan perangkat keras;
 - g. menyiapkan bahan rekayasa pengembangan perangkat keras
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pengumpulan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. menyiapkan bahan fasilitasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. menyiapkan bahan pertimbangan penggunaan/pemilihan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - d. menyiapkan bahan kerjasama dalam rangka layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketiga

Bidang Diseminasi dan Informasi

Pasal 8

- (1) Bidang Diseminasi dan Informasi, mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang diseminasi/penyebarluasan informasi ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Diseminasi dan informasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan rumusan dan kebijakan pelayanan informasi publik;
- b. pelaksanaan penyiapan rumusan dan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan media interaktif;
- c. pelaksanaan penyiapan rumusan dan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan media informasi;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1) Bidang Diseminasi Informasi , membawahi :

- 1. Seksi Layanan Informasi Publik;
- 2. Seksi Media Interaktif;
- 3. Seksi Media Informasi.

(2) Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang .

Pasal 10

(1) Seksi Layanan Informasi Publik, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelayanan informasi publik;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi, pemantauan dan melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kelembagaan layanan publik;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang layanan publik;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan iklan layanan masyarakat;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota guna mendapatkan bahan sajian pelayanan informasi;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Media Interaktif, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi secara langsung (*interpersonal communication*);
- b. menyiapkan bahan sosialisasi kebijakan pembangunan dan pemerintahan;
- c. menyiapkan bahan dialog publik;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi komunikasi publik;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait guna mendapatkan bahan sajian pelayanan informasi;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Seksi Media Informasi, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyebarluasan informasi melalui media elektronik, cetak dan luar ruang;
- b. menyiapkan bahan diseminasi informasi melalui media radio dan televisi;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan radio milik pemerintah daerah;
- d. menyiapkan bahan penerbitan tabloid, majalah dan penerbitan lainnya;
- e. menyiapkan bahan penyertaan pameran/promosi;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan produksi media luar ruang ;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan news room;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait guna mendapatkan bahan sajian pelayanan informasi;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Jaringan Komunikasi

Pasal 11

(1) Bidang Jaringan Komunikasi mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan kerjasama jaringan komunikasi antar lembaga komunikasi dan informasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Jaringan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan pendayagunaan kelembagaan komunikasi pemerintah dan kelembagaan komunikasi sosial.
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan hubungan antar kelembagaan komunikasi dan informasi
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan penguatan lembaga informasi publik
- d. pelaksanaan perumusan pola pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi
- e. pelaksanaan koordinasi dibidang pemberdayaan jaringan komunikasi pemerintahan, masyarakat dan pengembangan pelayanan publik
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Bidang Jaringan Komunikasi, Membawahi :

- a. Seksi Komunikasi Sosial;
- b. Seksi Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi;
- c. Seksi komunikasi Pemerintah.

(2) Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

(1) Seksi Komunikasi Sosial, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pendayagunaan lembaga komunikasi sosial;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan media tradisional;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan komunitas komunikasi berdasar kesetaraan gender;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dibidang pemberdayaan jaringan komunikasi pemerintahan, masyarakat dan pengembangan pelayanan publik;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan lembaga;
- b. menyiapkan bahan penyusunan hubungan kemitraan lembaga komunikasi pemerintah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan hubungan kemitraan lembaga profesi;
- d. menyiapkan bahan penyusunan hubungan kemitraan lembaga pemantau media/lembaga konsumen media;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam rangka pemberdayaan jaringan komunikasi pemerintahan, masyarakat dan pengembangan pelayanan publik;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Seksi Komunikasi Pemerintah, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan fasilitasi pengembangan pusat informasi publik;
- b. menyiapkan bahan fasilitasi pusat-pusat informasi publik;
- c. menyiapkan bahan fasilitasi pemberdayaan komunitas komunikasi strategis yang berkembang di masyarakat;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dibidang pemberdayaan jaringan komunikasi pemerintahan, masyarakat dan pengembangan pelayanan publik;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 14

(1) Bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pemberdayaan telematika pemerintahan, masyarakat dan pengembangan muatan telematika.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan bahan pemberdayaan Telematika pemerintahan, masyarakat dan pengembangan muatan telematika;
- b. pelaksanaan penyusunan pedoman dalam rangka pemberdayaan Telematika pemerintahan, masyarakat dan pengembangan muatan telematika;
- c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penerapan dibidang Telematika pemerintahan, masyarakat dan pengembangan muatan telematika;
- d. pelaksanaan fasilitasi penerapan telematika pemerintahan, masyarakat dan pengembangan muatan telematika;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam rangka pemberdayaan telematika pemerintahan, masyarakat dan pengembangan muatan telematika;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah;
 - b. Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Masyarakat;
 - c. Seksi Pengembangan Muatan Teknologi Informasi Komunikasi.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan pengumpulan bahan pemberdayaan Telematika pemerintahan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dalam rangka pemberdayaan Telematika pemerintahan;
 - c. menyiapkan bahan fasilitasi penerapan telematika pemerintahan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dibidang pemberdayaan telematika pemerintahan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Masyarakat, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan pengumpulan bahan pemberdayaan Telematika bagi masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dalam rangka pemberdayaan Telematika bagi masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan penerapan telematika dilingkungan masyarakat;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dibidang pemberdayaan Telematika masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan sosialisasi pemanfaatan telematika kepada masyarakat;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- (3) Seksi Pengembangan Muatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan pengumpulan bahan pengembangan muatan telematika;

- b. menyiapkan bahan penyusunan desain format dan media dalam rangka pengembangan muatan telematika;
- c. menyiapkan bahan perekayasa pengembangan muatan telematika;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Pos dan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban serta evaluasi kegiatan pelayanan usaha jasa pos dan telekomunikasi khusus serta standarisasi alat peralatan pos dan telekomunikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pos dan Telekomunikasi, mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan analisis pelayanan dan kegiatan usaha jasa pos, filateli, telekomunikasi dan telekomunikasi khusus;
 - b. pelaksanaan pemberian pertimbangan standarisasi teknis pos, telekomunikasi dan telekomunikasi khusus di Provinsi;
 - c. pelaksanaan penyusunan teknis kegiatan usaha jasa pos, filateli, telekomunikasi dan telekomunikasi khusus;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan usaha pos, filateli, telekomunikasi dan telekomunikasi khusus;
 - e. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahi :
- b. Seksi Pos dan Filateli;
 - b. Seksi Telekomunikasi;
 - c. Seksi Pengawasan dan Penertiban.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Seksi Pos dan Filateli, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan ketentuan persyaratan pengusahaan jasa titipan;

- b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian jasa titipan;
- c. menyiapkan bahan standarisasi sarana prasarana jasa pos;
- d. menyiapkan bahan pembinaan kegiatan filateli;
- e. menyiapkan bahan analisis data pelayanan jasa titipan dan filateli;
- f. menyiapkan bahan bimbingan dan petunjuk teknis penyelenggaraan jasa pos;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Telekomunikasi, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pertimbangan perusahaan/penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan telekomunikasi khusus;
- b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi serta telekomunikasi khusus;
- c. menyiapkan bahan analisis data pelayanan jasa telekomunikasi dan telekomunikasi khusus;
- d. menyiapkan bahan bimbingan dan petunjuk teknis penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan telekomunikasi khusus;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Seksi Pengawasan dan Penertiban, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap pengguna/penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi khusus;
- b. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap perusahaan/penyelenggaraan jasa titipan telekomunikasi khusus;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penggunaan/pemanfaatan menara telekomunikasi;
- d. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi perusahaan, penyelenggaraan usaha jasa titipan, telekomunikasi dan telekomunikasi khusus;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Pasal 20

- (1) Bidang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengendalian dan pemeliharaan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan komunikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengelolaan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan pedoman pengembangan, pengendalian dan pemeliharaan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. pelaksanaan penyusunan kebutuhan dan konfigurasi pengendalian dan pemeliharaan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan pemeliharaan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengembangan pengendalian dan pemeliharaan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Bidang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi , membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. Seksi Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. Seksi Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pengembangan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- b. menyiapkan bahan perancangan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. menyiapkan bahan penerapan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan uji coba hasil pengembangan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pengendalian Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. menyiapkan bahan petunjuk operasional Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. menyiapkan bahan pertimbangan penggunaan / pemilihan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
- d. menyiapkan bahan kerjasama pengendalian Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan operasionalisasi Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
- h. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

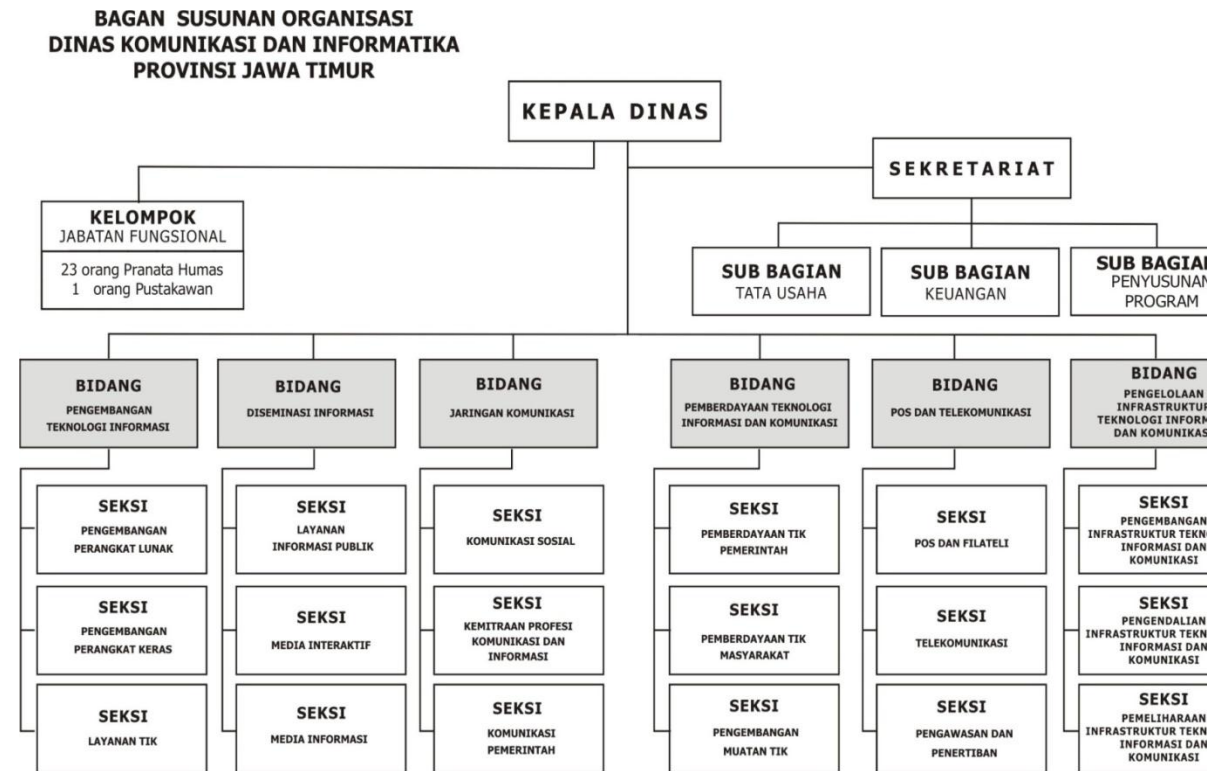
(3) Seksi Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pemeliharaan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian dan pengkajian kelayakan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

* Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung)

STRUKTUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI JAWA TIMUR



2.2 SUMBER DAYA DINAS KOMINFO PROV. JATIM

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 178 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Komposisi Status Kepegawaian :

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	148 orang	(84%)
2	CPNS	0 orang	(0%)
3	Honorar	30 orang	(16%)
	Jumlah	178 orang	(100%)

b. Komposisi Jabatan PNS

No.	Jabatan PNS	Jumlah	Prosentase
1	Jabatan Struktural	28 orang	(19%)
2	Jabatan Fungsional Tertentu	21 orang	(14%)
	<i>Pranata Humas Tk. Ahli :</i>		
	Pranata Humas Pertama	0 orang	
	Pranata Humas Muda	1 orang	
	Pranata Humas Madya	3 orang	
	<i>Pranata Humas Tk. Terampil :</i>		
	Pranata Humas Penyelia	8 orang	
	Pranata Humas Pelaksana Lanjutan	8 orang	
	Pranata Humas Pelaksana	0 orang	
	Pranata Humas Pelaksana Pemula	0 orang	
3	Jabatan Fungsional Umum	99 orang	(66%)
	Jumlah	148 orang	(100%)

c. Komposisi Eselon PNS :

No.	Eselon PNS	Jumlah	Prosentase
1	Eselon II.a	1 orang	(1%)
2	Eselon III.a	7 orang	(5%)
3	Eselon IV.a	20 orang	(14%)
4	Staf	120 orang	(81%)
	Jumlah	148 orang	(100%)

d. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang Tahun 2013

N O	URAIAN	GOLONGAN I					GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV					GRAN D TOTAL
		a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	
1	Kepala Dinas																			1	1	1
2	Sekretariat			1	2	3	6	10	5	3	24	7	13	2	6	28	2				2	57
3	Bidang Pengembangan Teknologi Informasi					0	1	1			2		5	2	2	9	1	1			2	13
4	Bidang Diseminasi dan Informasi					0				1	1		1		2	3	2	1			3	7
5	Bidang Jaringan Komunikasi					0				1	1	1	3		2	6	2	1			3	10
6	Bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi				1	1	2	1			3	3	2	1	1	7	2	1			3	14
7	Bidang Pos dan Telekomunikasi					0	1	1		1	3	1	1	1	4	7	1	1			2	12
8	Bidang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi					0	1	1			2	4	3		2	9	2				2	13
9	Fungsional					0					0	1	7	4	6	18	3				3	21
	Jumlah	0	0	1	3	4	11	14	5	6	36	17	35	10	25	87	15	5	0	1	21	148

e. Komposisi Pendidikan PNS :

No.	Pendidikan PNS	Jumlah	Prosentase
1	SD	3 orang	(2%)
2	SLTP	5 orang	(3%)
3	SLTA	70 orang	(47%)
4	D III	9 orang	(6%)
5	S 1	34 orang	(23%)
6	S2	27 orang	(18%)
	Jumlah	148 orang	(100%)

f. Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) :

No.	Pendidikan Pegawai Tidak Tetap	Jumlah	Prosentase
1	SLTA	5 orang	(17%)
2	D III	1 orang	(3%)
3	S 1	24 orang	(80%)
	Jumlah	30 orang	(100%)

g. Komposisi Umur PNS :

No.	Umur PNS	Jumlah	Prosentase
1	< 25 th	-	
2	25 – 30 th	12 orang	(8%)
3	31 – 40 th	32 orang	(22%)
4	41 – 50 th	52 orang	(35%)
5	51 – 55 th	51 orang	(34%)
6	> 56 th	1 orang	(1%)
	Jumlah	148 orang	(100%)

h. Data pegawai menurut Gender :

No.	Pegawai menurut gender	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	97 orang	(66%)
2	Perempuan	51 orang	(34%)
	Jumlah	148 orang	(100%)

i. Pegawai Dinas Kominfo Prov. Jatim yang diperbantukan :

No.	Pegawai menurut gender	Jumlah
1	Komisi Informasi Prov. Jatim	11 orang
	Jumlah	11 orang

2.2.1 Sarana dan Prasarana

TABEL 2.2.1
JUMLAH ASSET DINAS KOMINFO PROV. JATIM

No	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	<i>Golongan Tanah meliputi :</i>	2		
	a. Tanah	2	Bidang	Sertifikat Biro Keuangan
2.	<i>Golongan Peralatan dan Mesin meliputi :</i>	3.258		
	a. Alat-alat besar	1	Buah/set	Genset dan pompa air
	b. Alat-alat angkutan	58	Buah	Roda Empat dan Roda Dua
	c. Alat-alat bengkel dan alat ukur	21	Buah	Alat-2 ex BPDE
	d. Alat kantor dan rumah tangga	2833	Buah	Barang-barang inventaris
	e. Alat studio dan komunikasi	344	Buah	Kamera, DVD, Mixer dll
	f. Alat-alat laboratorium	1	Buah	Studio
3.	<i>Golongan Gedung dan Bangunan meliputi :</i>	3		
	a. Bangunan gedung	3	Buah	Gedung perkantoran
4.	<i>Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi :</i>	4		
	a. Instalasi	1	Buah	Jaringan internet
	b. Jaringan	3	Buah	Jaringan internet
5.	<i>Golongan Asset Tetap Lainnya meliputi :</i>	729		
	a. Buku dan perpustakaan	718	Buat/set	Judul buku yang ada di perpustakaan
	b. Barang dan corak kebudayaan	11	Buah/set	Band dan Gamelan, buku khusus kebudayaan
	Jumlah	3.996		

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KOMINFO PROV. JATIM

- Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur meliputi :
 - a. **TELECENTER** merupakan pusat informasi bagi masyarakat berbasis TIK dalam rangka memberdayakan masyarakat yang dikelola oleh masyarakat. Fasilitas ini disediakan untuk memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengakses informasi secara cepat dan murah. Telecenter merupakan tempat dilaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, juga pertemuan-pertemuan warga. Selain itu telecenter dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dengan dukungan media dan teknologi untuk memudahkan survei pasar, pemasaran dan transaksi. Dengan telecenter, masyarakat dapat melakukan banyak kegiatan komunikasi mencari informasi, berkomunikasi dengan pihak lain, dan mendapatkan layanan sosial dan ekonomi. Semuanya dilakukan dengan dukungan TIK, misalnya melalui telepon, komputer dan sambungan internet. Selain itu telecenter dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dengan dukungan media dan teknologi untuk memudahkan survey pasar, pemasaran dan transaksi;
 - b. **PENERAPAN TATA KELOLA TIK** dalam hal ini Pemeringkatan e-Gov merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka untuk melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga-lembaga pemerintah secara nasional yang tujuannya adalah sebagai berikut :
 1. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK dilingkungan pemerintah
 2. Memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif.
 3. Mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur pada khususnya dan secara nasional pada umumnya.

- c. **SURAT MENYURAT ELEKTRONIK (E-OFFICE)** dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan administrasi perkantoran yang dilakukan secara elektronik dan menggunakan bantuan alat komunikasi dan system informasi.
- d. **FASILITASI COLOCATION DAN HOSTING** merupakan pelayanan teknis kepada SKPD Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota dengan menempatkan server dan aplikasinya untuk memperoleh fasilitas akses internet dalam mendukung layanan informasi publik;
- e. **KEAMANAN INFORMASI** untuk mengevaluasi keamanan informasi yang ada di Prov. Jatim, adapun evaluasi dilakukan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001 : 2009
- f. **INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK** merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar SKPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-goverment dan layanan publik;
- g. **JASA POS DAN TELEKOMUNIKASI** merupakan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengawasan, perizinan bidang pos, telekomunikasi dan telekomunikasi khusus diantaranya izin penyelenggaraan Usaha Jasa Titipan, Penerbitan Rekomendasi Kelengkapan Data Administrasi dan Data Teknik Lembaga Penyiaran TV, Pembinaan dan Pengawasan menaRa Telekomunikasi, Bimbingan Teknis Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk serta Pemberian Bimbingan Teknik Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO).
- h. **PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)** merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan,

mengolah dan menyebarkan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya.

- i. **MEDIA PERTUNJUKAN RAKYAT (PERTURA)** merupakan salah satu bentuk media tradisional yang komunikatif dalam bentuk kelompok seni pertunjukan rakyat yang mampu menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat.
- j. **FORUM BAKOHUMAS PROVINSI JAWA TIMUR** merupakan kegiatan forum pertemuan untuk menyamakan persepsi program dan kebijakan pemerintah antar-Humas SKPD Provinsi dan BUMN/BUMD dengan berbagai stakeholder pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Timur.
- k. **NGOBROL PINTER (NGOPI) BARENG PAK DE KARWO** adalah bentuk sosialisasi program pembangunan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disampaikan dalam bentuk dialog interaktif di media televisi.
- l. **JATIM NEWSROOM (JNR)** merupakan pusat atau dapur informasi yang memproduksi hasil liputan berupa berita aktual. Peran Newsroom sangat strategis, mengingat produk informasi yang dihasilkan menjadi penyeimbang berita media lainnya, sekaligus sebagai referensi bagi masyarakat dan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- m. **MEDIA ON-LINE** merupakan fasilitas akses informasi berbasis TIK untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui situs www.jatimprov.go.id dan www.kominfo-jatim.go.id;
- n. **MAJALAH POTENSI** merupakan salah satu media penyebaran informasi bagi masyarakat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk penerbitan. Khalayak sarannya Kabupaten/Kota, Kecamatan se Jawa Timur serta Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se Jawa Timur dan Telecenter se Jatim.

- o. **AJANG WADUL** merupakan salah satu program unggulan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan sebagai wadah untuk menyampaikan keluhan masyarakat secara interaktif. Program Ajang Wadul yang dirintis sejak tahun 2005 dan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan TVRI. Program ini dinilai tepat sasaran dalam era keterbukaan informasi publik dan mampu berkiprah banyak serta lebih memberi manfaat bagi masyarakat luas;

- p. **FASILITASI KOMISI INFORMASI PROVINSI (KIP)** merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Timur

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah media informasi yang bermanfaat bagi masyarakat	-	-	-	10	12	12	12	12	9	10	12	10	12	90,00%	83,33%	100,00%	83,33%	100,00%
2	Prosentase tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagai pelaksanaan diseminasi informasi	-	-	-	0%	0%	80%	83%	92%	0%	0%	79%	96%	136,38%	-	-	98,75%	115,66%	148,24%
3	Prosentase pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat	-	-	-	0%	0%	33%	47%	62%	0%	0%	22%	30%	59,22%	-	-	66,67%	63,83%	95,52%
4	Prosentase infrastruktur yang terbangun untuk pelayanan publik	-	-	-	50%	65%	80%	94%	98%	47%	61%	74%	92%	105,26%	94,00%	93,85%	92,50%	97,87%	107,41%
5	Prosentase ketersediaan website pada unit kerja pemprov. Jatim dan kabupaten/kota	-	-	-	15%	24%	37%	42%	53%	10%	22%	28%	37%	45,60%	66,67%	91,67%	75,68%	88,10%	86,04%
6	Prosentase pemanfaatan hosting dan collocation	-	-	-	4%	9%	12%	20%	27%	2%	4%	5%	7%	9,33%	50,00%	44,44%	41,67%	35,00%	34,56%
7	Prosentase unit kerja pemprov. Jatim dan kabupaten/kota yang telah membentuk PPID	-	-	-	-	-	8%	10%	12%	-	-	3%	5%	13,24%	0,00%	0,00%	37,50%	50,00%	110,33%

Surabaya, Maret 2016

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR

Ir. EDDY SANTOSO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580927 198701 1 002

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Timur

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	5.334.085.000	5.057.275.000	5.245.980.000	-	-	5.016.193.891	4.952.940.220	5.047.404.877
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.059.331.000	5.424.091.000	1.980.205.000	-	-	4.851.188.254	5.208.151.288	1.834.544.197		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.000.000	256.000.000	605.800.000	1.119.100.000	1.250.500.000	36.600.000	253.471.500		1.068.556.099	1.191.177.439
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	1.764.220.000	1.933.025.000	2.007.220.000	-		1.731.907.300	1.922.970.000	1.979.290.000
Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.314.635.000	-	-	675.500.000	696.000.000	1.301.217.700	1.656.875.583		659.710.000	654.140.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	-	-		580.023.700		
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	-	50.000.000	211.650.000	204.150.000	211.650.000	-	40.864.800	200.400.000	192.382.500	210.730.000
Program Pengembangan, dan Pembinaan Pos, Frekuensi Radio dan Telematika	9.521.975.000	-	-	-	-	8.567.732.649				
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	7.659.200.000	-	-	-	-	7.153.845.288				
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	-	10.957.594.000	11.267.066.000	10.646.244.000	12.393.164.000	-	10.511.706.600	11.088.608.860	10.345.816.297	11.007.416.235
Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi Komunikasi	-	475.600.000	475.600.000	550.600.000	550.600.000	-	465.057.900	440.467.900	532.104.000	485.335.375
Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika	-	4.833.000.000	5.635.000.000	5.585.000.000	5.134.980.000	-	4.623.973.659	5.447.892.549	5.487.294.803	4.961.533.644
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-	1.867.806.000	1.847.806.000	2.436.106.000	2.490.906.000	-	1.834.327.113	1.792.294.200	2.411.414.100	2.350.792.560

Surabaya, Maret 2016

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR

Ir. EDDY SANTOSO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580927 198701 1 002

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN TIK DINAS KOMINFO PROV. JATIM

Pengembangan pelayanan Dinas Kominfo Prov. Jatim dalam 5 tahun ke depan memiliki peran yang strategis sebagai pusat data center dan TIK di Jawa Timur, sehingga perlu adanya persiapan dalam beberapa hal baik dalam penyediaan perangkat keras maupun lunak dalam menghadapi tantangan pengembangan layanan TIK. Untuk mewujudkan Kominfo sebagai pusat data center di Jawa Timur tentu saja perlu dorongan good will dari pimpinan dan stake holder lainnya untuk dapat mengimplementasikan rencana strategis disamping juga memberikan SDM yang mumpuni dapat mengaplikasikan TIK tersebut.

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan TIK yaitu :

2.4.1 Tantangan :

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
2. Kesenjangan informasi di masyarakat
3. Pesatnya perkembangan TIK
4. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata
5. Terbatasnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat terhadap TIK
6. Bentuk kelembagaan Kominfo di daerah yang beragam
7. Implementasi masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia (MP3EI) koridor jawa dalam kerangka telematika

2.4.2 Peluang :

1. Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo
2. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government
5. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi
6. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan
7. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo

Tabel 2.4
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur
dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase penurunan pengaduan	Meningkatnya diseminasi informasi, dan keterbukaan informasi publik	<ul style="list-style-type: none">• Internet Sehat• Keamanan informasi• E-goverment
2.	Persentase tindak lanjut sengketa informasi		
3.	Persentase pemberdayaan masyarakat yang paham TIK	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	
4.	Persentase pemanfaatan hosting dan collocation	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik	
5.	Persentase SKPD, UPT, Lembaga Non Struktural dan Kab/Kota yang memiliki website sesuai standar muatan TIK		
6.	Penilaian Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGi) Tingkat Provinsi		
7.	Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengupload data terkini		
8.	Persentase penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	Meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK, FUNGSI

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Prov. Jatim pada dasarnya berfungsi sebagai penyebarluasan informasi melalui TIK pada 5 (lima) tahun ke depan merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat akan pentingnya informasi.

Informasi melalui TIK sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam memenuhi hajat hidup sehingga perlu dibangun ke depan dalam skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengembangan TIK merupakan issue strategis pada 5 (lima) tahun ke depan.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KOMINFO PROV. JATIM

1. Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional
2. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database SKPD
3. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat
4. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK

Tabel 3.1.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo Prov. Jatim

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan Dinas Kominfo)	Eksternal (Diluar kewenangan Dinas Kominfo)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase penurunan pengaduan	Penurunan pengaduan pada akhir 2015 sebesar 0000 pengaduan	SK Kepala Dinas			Belum optimalnya penyebaran media informasi
Persentase tindak lanjut sengketa informasi	Pengaduan sejumlah 0000 yang terselesaikan	Surat Keputusan Gubernur Jatim	Koordinasi lintas SKPD yang belum maksimal		Belum optimalnya jumlah jam tayang ajang wadul di media elektronik
Persentase pemberdayaan masyarakat yang paham TIK		<i>Permenkominfo : no : 08 /PER/M.KOMIN FO/6/2010 SK. GUB No. 188/131/kpts/0 13/2012</i>		Pembentukan KIM merupakan kewenangan dari kabupaten/kot a	Pemberdayaan masyarakat melalui TIK dilaksanakan dalam bentuk kegiatan workshop TIK bagi masyarakat dengan sasaran kelompok tani, nelayan, wanita dan UKM
Persentase pemanfaatan hosting dan collocation	SKPD Prov. Jatim dan kabupaten/kota sebanyak 122	Belum ada Pergub yang menjadi acuan/SOP	Perlu membentuk Kepgub/Pergub Jatim untuk dijadikan payung hukum dalam pemanfaatan hosting dan collocation		Unit kerja di Kabupaten/kota masih banyak yang belum berhosting
Persentase SKPD, UPT, Lembaga Non Struktural dan Kab/Kota yang memiliki website sesuai standar muatan TIK	Website SKPD Prov. Jatim dan kabupaten/kota sebanyak 97	Belum ada Pergub yang menjadi acuan/SOP	Perlu membentuk Kepgub/Pergub Jatim untuk dijadikan payung hukum dalam pengembangan dan muatan di website		Unit kerja di Kabupaten/kota masih banyak yang belum memiliki website
Penilaian Peningkatan e-Government Indonesia (PeGi) Tingkat Provinsi	Peringkat II Tingkat Nasional	Permenkominfo			
Rata-rata waktu yang di butuhkan untuk mengupload data terkini		Belum ada Pergub yang menjadi acuan/SOP			
Persentase penyelenggaraan pos dan telekomunikasi		Permenkominfo Nomor 32 tahun 2014 tentang Persyaratan dan tata cara		Collecting dan updating data mengenai telekomunikasi di Jatim harus	

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan Dinas Kominfo)	Eksternal (Diluar kewenangan Dinas Kominfo)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemberian Izin Penyelenggara Pos		terintegrasi dengan baik	

Tabel 3.1.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cloud Computing dalam Sistem Teknologi Informasi	Menuju era digitalisasi broadband dari sistem analog	Implementasi e-Government di Jawa Timurbelum optimal	
2		Keterbukaan Informasi	Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi	
3		Masalah Keamanan Informasi	Pemberdayaan dan Peran Aktif Masyarakat dalam Penyebarluasan Informasi	

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Tabel 3.2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: <i>"Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak".</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 4 :			
	Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik			
	Fokus Program1 :			
	Mengembangkan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi , sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolak ukurnya	<ul style="list-style-type: none"> – Masih terjadinya kesenjangan di bidang komunikasi sosial dan teknologi informasi (digital device) di masyarakat khususnya antara desa dan kota. – Belum optimalnya penyebaran informasi kepada masyarakat – Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik – Belum adanya Rencana Induk Tata Kelola TIK 	<ul style="list-style-type: none"> – Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional – Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database SKPD – Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat – Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK – Belum ada aturan baku yang mengatur urusan bidang komunikasi dan informatika seperti website, hosting dan colocation dll – Belum optimalnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> – Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo – Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan – Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik – Kebutuhan pengembangan muatan e-Government – Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik

3.3 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI

Tabel 3.3.1
Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.		– Masih terjadinya kesenjangan di bidang komunikasi sosial dan teknologi informasi (digital device) di masyarakat khususnya antara desa dan kota.	– Terbatasnya sumber daya manusia yangampil dan profesional – Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database SKPD	– Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo – Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
2.		– Belum optimalnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat	– Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat – Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK	– Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
3.		– Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	– Belum ada aturan baku yang mengatur urusan bidang komunikasi dan informatika seperti website, hosting dan colocation dll – Belum optimalnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	– Pengembangan muatan e-Government – Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
4.		– Belum adanya Rencana Induk Tata Kelola TIK (Perpres No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025).		

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Tabel 3.4.1
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	-	-	-	-

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu 2014-2019 antara lain :

1. Implementasi e-Government

Implementasi e-Government yang mulai berkembang di Jawa Timur dalam lima tahun terakhir dinilai oleh pihak pusat sebagai provinsi yang berhasil dengan baik. Namun secara substantif masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi e-Government semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup infrastruktur, konten, aplikasi dan sumberdaya manusia.

2. Data Center

Pembangunan data center yang baik dan terintegrasi diharuskan mempunyai beberapa sarana penunjang yang dapat diintegrasikan antara peralatan satu dengan peralatan yang lainnya dan berfungsi sesuai dengan standarisasi yang berlaku. Desain dan pembangunan data center yang baik dengan terintegrasi diharuskan mengacu pada standarisasi internasional dan implementator yang akan membangun data center. Adapun manfaat data center sebagai upaya mendorong percepatan pelaksanaan *e-government* di Jawa Timur yang semakin berkembang, serta memberikan akses data dan informasi bagi aparatur dan masyarakat yang mudah, cepat, efektif dan efisien. Pada tahun 2015 Dinas Kominfo Prov. Jatim akan membangun data center secara terintegrasi antara data dan informasi yang memberikan rasa aman bagi jajaran pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3. Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

4. Pemberdayaan dan Peran Aktif Masyarakat dalam Penyebarluasan Informasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat membuat masyarakat kini tak lagi hanya sekedar konsumen informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Namun masyarakat kini adalah sumber (*source*), saluran (*channel*) dan penerima (*receiver*) informasi itu sendiri. Hal ini kemudian menjadikan paradigma penyampaian informasi yang *top-down* tidak lagi relevan untuk diterapkan. Sebab pola komunikasi sosial yang kini hadir tidak lagi bersifat singular tapi sudah berbentuk sirkuler. Dengan demikian, masyarakat harus dipandang sebagai khalayak aktif yang mampu memproduksi, menyampaikan dan mengonsumsi informasi sekaligus. Hal ini mau tidak mau menjadikan paradigma penyampaian informasi yang *bottom-up* adalah yang paling relevan untuk diterapkan saat ini.

Paradigma baru komunikasi sosial ini mengandung konsekuensi logis yaitu masyarakat harus diberdayakan agar mampu menjadi agen penyebarluasan informasi tepat sasaran, produsen informasi yang sehat dan konsumen informasi yang cerdas. Disinilah peran strategis pemerintah untuk menjalankan program pemberdayaan (*empowering*) tersebut dengan menggali potensi masyarakat, penyediaan fasilitas komunikasi dan menghimpun serta menciptakan jejaring antar kelompok-kelompok komunikasi sosial yang tersebar di masyarakat.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI DINAS KOMINFO PROV. JATIM

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim tidak terlepas dari visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu *"Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak"*.

Penetapan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim berlandaskan pada tugas pokok dan fungsi dinas yaitu "melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dekonsentrasi dan tugas pembantuan urusan bidang komunikasi dan informatika". Dalam kurun waktu 2014-2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur hendaknya mampu mendukung pelaksanaan akselerasi Pembangunan Daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, disamping itu visi ini juga merupakan pemandu arah bagi institusi dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatannya.

Berdasarkan uraian diatas, adapun visi Dinas KominfoProv. Jatim yaitu :

***"Terwujudnya Penyebarluasan Informasi dan Pelayanan Publik
melalui TIK di Jawa Timur"***

Misimerupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi di atas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Kominfodengan mengacu pada misi ke empat Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu : ***"Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan***

Pelayanan Publik” yang dititikberatkan untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*), serta profesionalisme pelayanan publik.

Dalam mendukung misi ke empat tersebut, maka disusunlah 2 (dua) misi Dinas Kominfo Prov. Jatim sebagai berikut :

1. Misi Pertama: *Meningkatkan kapasitas layanan penyebaran informasi, memberdayakan potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika.*

Misi ini untuk mewujudkan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat serta lembaga komunikasi sosial yang diberdayakan melalui TIK di Jawa Timur.

2. Misi Kedua : *Mengembangkan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik.*

Misi ini untuk mewujudkan infrastruktur TIK di daerah, pengembangan aplikasi yang diterapkan dilingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan adanya payung hukum/standarisasi dalam bidang urusan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Jawa Timur.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan visi Dinas Kominfo Prov. Jatim tahun 2014 – 2019 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misinya. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya.

Tujuan Renstra Dinas Kominfo Prov. Jatim tahun 2014 – 2019 yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik.
2. Meningkatkan layanan, pemanfaatan infrastruktur TIK serta tertib administrasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.

Sedangkan sasaran Renstra Dinas Kominfo Prov. Jatim tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :

1. Meningkatnya diseminasi informasi dan keterbukaan informasi publik
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika
3. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik
4. Meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kominfo Prov. Jatim beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.2 sebagaimana berikut :

Tabel 4.2.1

Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kominfo Prov. Jatim

NO .	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik	Mengurangi masyarakat yang gagap TIK supaya melek informasi	Meningkatnya diseminasi informasi, dan keterbukaan informasi publik	Persentase penurunan pengaduan	4%	3%	2%	1%	1%
				Prosentase tindak lanjut sengketa informasi	91%	90%	87%	86%	83%
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	Persentase pemberdayaan aparatur dan masyarakat yang paham TIK	80%	87%	87%	89%	90%
2.	Meningkatkan layanan, pemanfaatan infrastruktur TIK serta tertib administrasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.	Membuka akses pelayanan publik melalui pemanfaatan infrastruktur TIK	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik	Persentase pemanfaatan hosting dan collocation	67%	69%	73%	77%	79%
				Persentase Website SKPD dan Kab/Kota yang telah memenuhi 75% kriteria standar muatan TIK	40%	50%	60%	70%	80%
			Meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	Persentase penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	49%	55%	64%	69%	71%

Target kinerja yang hendak dicapai mulai tahun 2015 s/d 2019 terkait **sasaran satu** dari **tujuan satu** adalah Persentase penurunan pengaduan yang ditargetkan sebesar 4% s/d 1% dan Prosentase tindak lanjut sengketa informasi yang ditargetkan 91% s/d 83%. Untuk **sasaran dua** dari **tujuan satu** adalah Persentase pemberdayaan aparatur dan masyarakat yang paham TIK 80% s/d 90%.

Untuk **sasaran satu** dari **tujuan dua** adalah Persentase pemanfaatan hosting dan collocation yang ditargetkan sebesar 67% s/d 79% dan Persentase Website SKPD dan Kab/Kota yang telah memenuhi 75% kriteria standar muatan TIK yang ditargetkan 40% s/d 80%. Sedangkan target kinerja yang hendak dicapai mulai tahun 2015 s/d 2019 terkait **sasaran dua** dari **tujuan dua** adalah Persentase pembinaan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi yang ditargetkan 49% org s/d 71%.

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

Untuk mewujudkan visi *"Terwujudnya Penyebarluasan Informasi dan Pelayanan Publik melalui TIK di Jawa Timur"* melalui 2 (dua) misi, maka dilakukan berlandaskan 4 (empat) strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi
2. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi
3. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan muatan e-government dan kualitas pelayanan publik
4. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Pos dan Telekomunikasi didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM professional

Dari ke empat strategi di atas menjadi rumusan untuk mencapai keberhasilan dari suatu program dan kegiatan yang berlandaskan dan berpedoman pada arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolak ukurnya.
2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menerapkan strategi dan arah kebijakan, maka Dinas Kominfo Prov. Jatim mengklasifikasi dan melakukan identifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

Faktor Internal			
No	Kekuatan (<i>Strength</i>)	No	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
1	Tersedianya Sumberdaya Manusia yang cukup	1	Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional
2	Tersedianya anggaran	2	Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database SKPD
3.	Tersedianya sarana prasarana yang memadai	3.	Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat
4.	Tersedianya tupoksi yang mendukung penyebarluasan informasi, pengembangan TIK, Pos dan telekomunikasi	4.	Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK
Faktor Eksternal			
No	Peluang (<i>Opportunities</i>)	No	Ancaman (<i>Threats</i>)
1.	Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo	1.	Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
2.	Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan	2.	Kesenjangan informasi di masyarakat
3.	Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik	3.	Pesatnya perkembangan TIK
4.	Kebutuhan pengembangan muatan e-Government	4.	Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata
5.	Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi	5.	Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK

6.	Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan	6.	Bentuk kelembagaan Kominfo di daerah yang beragam
7.	Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo		

Tabel 4.3.1
Penentuan Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran
Dinas Kominfo Prov. Jatim

<p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo 2. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan 3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik 4. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government 5. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi 6. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan 7. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo 	<p>Tantangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik 2. Kesenjangan informasi di masyarakat 3. Pesatnya perkembangan TIK 4. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata 5. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK 6. Bentuk kelembagaan Kominfo di daerah yang beragam
<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Sumberdaya Manusia yang cukup 2. Tersedianya anggaran 3. Tersedianya sarana prasarana yang memadai 4. Tersedianya tupoksi yang mendukung penyebaran informasi, pengembangan TIK, Pos dan telekomunikasi 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan pendayagunaan media informasi melalui peningkatan kualitas SDM 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung SDM yang cukup 3. Meningkatkan pendayagunaan media informasi melalui sarana prasarana secara optimal 4. Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi 5. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Pos dan Telekomunikasi didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM professional 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dalam mendukung pendayagunaan media informasi 2. Meningkatkan kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Memberdayakan potensi komunikasi masyarakat melalui pendayagunaan media informasi 4. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan muatan e-government dan kualitas pelayanan publik 5. Memberdayakan potensi komunikasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik

Kelemahan: 1. Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional 2. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database SKPD 3. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat 4. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK	Alternatif Strategi : 1. Mengoptimalkan SDM dalam menghadapi Globalisasi informasi 2. Mengembangkan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat dalam bidang Kominfo yang siap menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi 3. Meningkatkan kebutuhan SDM untuk mengurangi Kesenjangan informasi di masyarakat 4. Meningkatkan sarana prasarana guna menunjang kebutuhan Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik 5. Meningkatkan sarana prasarana guna mengurangi Kesenjangan informasi di masyarakat 6. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang operasional Kominfo	Alternatif Strategi : 1. Mengembangkan sistem Informasi dalam menghadapi 2. globalisasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik 3. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi 4. Meningkatkan kemampuan potensi informasi masyarakat untuk mengurangi kesenjangan informasi 5. Meningkatkan infrastruktur TIK yang menunjang kebutuhan integrasi sistem informasi dan database dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik 6. Mengoptimalkan kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi guna mengurangi Kesenjangan informasi di masyarakat 7. Meningkatkan pemberdayaan potensi informasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi informasi
--	--	--

Tabel 4.3.2
Penentuan Strategi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya diseminasi informasi, dan keterbukaan informasi publik	1) Persentase penurunan pengaduan 2) Persentase tindakan lanjut sengketa informasi	Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	1) Persentase pemberdayaan aparatur dan masyarakat yang paham TIK	Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi
3.	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik	1) Persentase pemanfaatan hosting dan collocation 2) Persentase SKPD, UPT, Lembaga Non Struktural dan Kab/Kota yang memiliki website sesuai standar muatan TIK	Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan muatan e-government dan kualitas pelayanan publik
		3) Penilaian Peningkatan e-Government Indonesia (PeGi) Tingkat Provinsi	

		4) Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengupload data terkini	
4.	Meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	Persentase penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Pos dan Telekomunikasi didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM professional

Tabel 4.3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : " Terwujudnya Penyebarluasan Informasi dan Pelayanan Publik melalui TIK di Jawa Timur"			
MISI I :			
Meningkatkan kapasitas layanan penyebaran informasi, memberdayakan potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik	Meningkatnya diseminasi informasi, dan keterbukaan informasi publik	Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi	Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolak ukurnya.
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi	
MISI II :			
Mengembangkan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasiserta pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan layanan, pemanfaatan infrastruktur TIK serta tertib administrasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik	Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan muatan e-government dan kualitas pelayanan publik	Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik. Belum
	Meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Pos dan Telekomunikasi didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM professional	

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dinas Kominfo Prov. Jatim dalam Rencana Strategis tahun 2014 -2019 merencanakan 9 Program dan 29 Kegiatan yang meliputi indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dijabarkan sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Indikator Kinerja : Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor

Target Kinerja : Capaian Kinerja bidang Sekretariat ditargetkan mulai tahun 2015 s/d 2019 adalah 100% terpenuhinya layanan adminastrasi perkantoran

1. Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran

Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan untuk administrasi perkantoran

Target Kinerja : Capaian Kinerja bidang Sekretariat ditargetkan mulai tahun 2015 s/d 2019 adalah selama 100% yang terdiri dari langganan multimedia, surat kabar, listrik, air, telepon, jasa kebersihan kantor, dll

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Indikator Kinerja : Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

Target Kinerja : Capaian Kinerja bidang Sekretariat ditargetkan mulai tahun 2015 s/d 2019 adalah 100% terpenuhinya layanan adminastrasi perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana

Indikator Kinerja : Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana dan prasaranayang tersedia

Target Kinerja : Capaian Kinerja bidang Sekretariat ditargetkan mulai tahun 2015 s/d 2019 adalah selama 12 bulan yang terdiri dari Komputer, Seragam Dinas, Ongkos Jahit, Belanja Kendaraan Roda 2, Pakaian Olahraga, Kendaraan 4.

2. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana

- Indikator Kinerja* : Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara
- Target Kinerja* : Capaian Kinerja bidang Sekretariat di targetkan mulai tahun 2015 s/d 2019 adalah selama 12 bulan yang terdiri dari Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Jaringan/ Instalasi (listrik, air, telp), Pemeliharaan Genset, Pemeliharaan Lift.

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

- Indikator Kinerja* : Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi
- Target Kinerja* : Capaian Kinerja bidang Sekretariat ditargetkan mulai tahun 2015 s/d 2019 adalah 12 bulan terpenuhinya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah.

1. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

- Indikator Kinerja* : Jumlah koordinasi dan konsultasi peningkatan kinerja kelembagaan Kominfo
- Target Kinerja* : Capaian Kinerja bidang Sekretariat ditargetkan mulai tahun 2015 s/d 2019 adalah selama 12 bulan yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Bantuan Transport dan/atau Uang Saku

2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

- Indikator Kinerja* : Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM
- Target Kinerja* : Capaian Kinerja bidang Sekretariat ditargetkan mulai tahun 2015 s/d 2019 adalah selama 12 bulan yang terdiri dari Pembinaan Pegawai, penilaian jabatan Fungsional, Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan

4. PROGRAM PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

- Indikator Kinerja* : Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

Target Kinerja : Capaian Kinerja bidang Sekretariat ditargetkan mulai tahun 2015 s/d 2019 adalah 38 Kab/Kota yang terpenuhinya penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintah.

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen dan laporan

Target Kinerja : Capaian Kinerja bidang Sekretariat ditargetkan mulai tahun 2015 s/d 2019 adalah 38 Kab/Kota yang terdiri RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA, Prognosis, LKPJ, LPPD, LRA, Hasil Rakor, dll.

Capaian Kinerja : Terwujudnya sinergitas program dan kegiatan bidang kominfo antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota di Jawa Timur

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen dan laporan

Target Kinerja : Capaian Kinerja bidang Sekretariat ditargetkan mulai tahun 2015 s/d 2019 adalah 13 dokumen yang terdiri dari dokumen LAKIP, dan laporan lainnya

Capaian Kinerja : Tersusunnya laporan-laporan terkait perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan bidang kominfo.

3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Indikator Kinerja : Jumlah data informasi yang tersedia dalam database Kominfo

Target Kinerja : Capaian Kinerja bidang Sekretariat ditargetkan tahun 2015 s/d 2019 adalah 12 bulan terpenuhinya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah

Capaian Kinerja : Tersusunnya data informasi Kominfo

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

Indikator Program : Jumlah Telecenter yang terbangun

Target Kinerja : Capaian kinerja Bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi, dan Komunikasi (TIK) ditargetkan dari mulai tahun 2015 s/d 2019 yang diuraikan melalui 5 kegiatan, antara lain :

1. Penerapan Tata Kelola TIK Pemerintahan

Indikator : Jumlah workshop dan sosialisasi

Target Kinerja :

Penerapan Tata Kelola TIK Pemerintahan melalui 2 kegiatan, yaitu Workshop dan Sosialisasi. Dengan memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang TIK, dapat tercipta peningkatan SDM di bidang Teknologi Informasi yang berkualitas. Adapun uraian kegiatan antara lain :

- a. Kegiatan Workshop Tata Kelola TIK Pemerintahan bagi Aparatur dilakukan sebanyak 4 kali per tahun
- b. Sosialisasi Tata Kelola TIK Pemerintahan 1 kali per tahun

Capaian Kinerja :

Pada tahun 2015 s/d 2019, Penerapan Tata Kelola TIK Pemerintahan dilakukan dalam 2 jenis kegiatan dengan 5 kali pelaksanaan, yaitu Kegiatan Workshop bagi Aparatur dilakukan sebanyak 4 kali, dan Kegiatan Sosialisasi dilakukan sebanyak 1 kali tiap tahunnya.

2. Standardisasi Sistem Informasi dan Muatan TIK

Indikator : Waktu update data dan informasi website

Target Kinerja :

Terwujudnya standar muatan TIK pemerintah di Jawa Timur menuju website pemprov Jatim yang dinamis, informatif dan terintegrasi.

Indikator	2014 Kondisi awal	2015	2016	2017	2018	2019 Kondisi akhir
Persentase SKPD, UPT, Lembaga Non Struktural dan Kab/Kota yang memiliki website sesuai standar muatan TIK	35 %	40 %	50%	60%	70%	80%

Adapun uraian kegiatan antara lain :

- a. Membuat pedoman muatan website SKPD dan Kab/Kota 1 kali
- b. Sosialisasi pedoman muatan website SKPD dan Kab/Kota 2 kali per tahun
- c. Monitoring muatan website SKPD dan Kab /Kota 12 bulan per tahun
- d. Koordinasi dengan pengelola website SKPD dan Kab/Kota 12 bulan per tahun
- e. Update data dan informasi website jatimprov.go.id 12 bulan per tahun

Capaian Kinerja :

Tahun 2015 dimulai dengan membuat standar muatan TIK selanjutnya disosialisasikan kepada pengelola website SKPD dan Kab/Kota masing-masing 1 kali. Diharapkan dengan kegiatan sosialisasi ini persentase website SKPD dan Kab/Kota yang memenuhi ketentuan pedoman muatan TIK adalah 50 %. Setiap tahun dilakukan kegiatan sosialisasi dengan harapan ada peningkatan 10 % per tahun, sehingga pada tahun 2019 jumlah website SKPD dan Kab/Kota yang memenuhi ketentuan pedoman muatan website SKPD dan Kab/Kota adalah 90 %.

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah website SKPD dan Kab/Kota yg memenuhi 75 kriteria standar muatan TIK}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD dan Kab/Kota}} \times 100\%$$

Dengan semakin tinggi persentase website SKPD dan Kab/Kota yang memenuhi ketentuan pedoman muatan TIK maka akan terwujud website pemprov Jatim yang dinamis, informatif dan terintegrasi.

3. Pemberdayaan Masyarakat Bidang TIK

Indikator Kinerja : Jumlah masyarakat yang mengikuti workshop

Target Kinerja :

Setiap diawali dengan membuat perencanaan pelaksanaan Workshop sebanyak 16 kali dan diharapkan setiap tahun tetap, melaksanakan minimal 16 kali.

Capaian Kinerja :

Perkiraan Pelaksanaan Workshop bagi Masyarakat sampai dengan tahun 2014 sebanyak 80 kali setiap kegiatan menampung sebanyak 20 peserta workshop, dengan jumlah total peserta 1.605 orang, sehingga setiap tahun rata-rata mampu memfasilitasi pelaksanaan untuk 16 kali kegiatan per tahun.

4. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan Telecenter

Indikator Kinerja : Jumlah pembangunan fisik telecenter

Target Kinerja :

Terbangunnya Telecenter di 38 Kab./Kota di Jatim sebanyak minimal 2 TC sehingga di akhir tahun 2019 telah terbangun 79 TC.

Terlaksananya kegiatan Pendidikan Teknis & Managerial bagi Pengelola Telecenter di Jawa Timur. Selama kurun waktu 2010 s/d 2014 telah berhasil melaksanakan Pendidikan Teknis & Managerial bagi Pengelola Telecenter di Jawa Timur sebanyak 105 orang, dengan jumlah pelatihan sebanyak 13 kali setiap pelatihan 8 orang peserta. Diharapkan diawal tahun 2015 mampu melakukan pendidikan Teknis & Managerial minimal 2 kali per kegiatan 8 Orang peserta, sehingga akhir tahun 2019 diperkirakan sudah 18 Kali dengan total peserta sebanyak 185 orang.

Capaian Kinerja :

Pada awal Tahun 2014 telah terbangun 39 Telecencer, dimana setiap TC mendapat bantuan sebanyak 8 Komputer. Untuk Tahun 2015 s/d 2019 TC yang kita bangun tidak sama dengan TC yang terdahulu, melainkan lebih kecil lagi yaitu dengan 4 PC, dan direncanakan setiap tahun mampu membangun 8 TC Model Baru sehingga diakhir tahun 2019 mampu membangun 79 TC yang tersebar di 38 Kab./Kota se Jatim.

6. PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMATIKA

Dalam upaya mencapai visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019 yang telah ditetapkan, Bidang Pengembangan Teknologi Informasi menyusun rencana Program dan Kegiatan 5 (lima) tahun ke depan sesuai tugas bidang yaitu melaksanakan pengembangan dan pengendalian serta pemeliharaan sarana prasarana Teknologi Informasi dengan uraian sebagai berikut:

a. Kondisi Eksisting Tahun 2014.

Mengacu ke DPA-SKPD DinasKominfo Prov. Jawa Timur Tahun 2014, bahwa Bidang Pengembangan Teknologi Informatika melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. Pengembangan dan Pemeliharaan Hardware dan Software, layanan Hosting dan Colocation :

Kegiatan ini mewadahi sub kegiatan berupa layanan 35 (tiga puluh lima) server colocation, 176 (seratus tujuh puluh enam) hosting, 1(satu) virtual private server (VPS), pembelian 5 (lima) perijinan untuk lisensi control panel, lisensi VPS, lisensi Zimbra, lisensi sistem keamanan, dan lisensi Secure Socket Layer (SSL) sebagai sistem pengamanan email resmi pemerintah untuk 25 (dua puluh lima) user serta 2 (dua) paket maintenance aplikasi web hosting dan maintenance VPS server. Disamping itu, bidang Pengembangan TI juga melaksanakan pengembangan aplikasi Sistem Manajemen Surat (SMS/ e-office) di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk melayani 12 (dua belas) Biro dan 4(empat) Asisten Sekretaris Daerah.

2. Fasilitas Teknis TIK Aparatur Pemprov Jatim dan Kab/Kota :

Pelaksanaan kegiatan ini berupa bimbingan teknis Sistem Informasi Manajemen dan bimbingan teknis penggunaan Zimbra bagi SKPD se Jawa Timur kepada 110 (seratus sepuluh) aparatur pemerintah dan Sosialisasi Bidang TIK Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Dari hasil kegiatan diatas keluarnya adalah SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur terlayani sebanyak 45 (empat puluh lima) SKPD dan sistem yang terintegrasi adalah sistem pengadaan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Timur.

b. Program dan Kegiatan Tahun 2015 – 2019.

Dengan melihat isu-isu strategis Jawa Timur dan perkembangan globalisasi, Bidang Pengembangan Teknologi Informatika dipandang perlu untuk menyusun kegiatan yang dapat mengakomodasi peranan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan telematika kedepannya.

Indikator Program : Jumlah SKPD yang terlayani Data center

Target Kinerja : Capaian kinerja bidang Pengembangan Teknologi Informasi ditargetkandari mulai Tahun 2015 s/d 2019 kegiatan antara lain :

1. Pengembangan Aplikasi TIK Pemerintahan

Indikator Kinerja : Jumlah Bimbingan Teknis

Target Kinerja :

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan kapasitas aparatur negara bidang telematika melalui bimbingan teknis telematika dan pendampingannya. Indikator kegiatannya adalah jumlah bimtek yang dilaksanakan. Adapun pelaksanaannya dalam lima tahun kedepan sebagai berikut :

No	Bimtek	Peserta (org)	Biaya (Jt Rp)	Tahun					Ket
				2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Email Administrator	75	100	X	X	X	-	-	
2.	Security jaringan	75	100	X	X	X	X	X	
3.	Sertifikasi SNI TIK	75	100	-	X	X	X	-	
4.	Zimbra	75	100	X	X	X	-	-	
5.	Sistem Informasi Manajemen	75	100	X	X	X	-	-	
6.	Security aplikasi	75	100	X	X	X	-	-	
7.	Penyusunan SOP TIK	75	100	-	X	X	X	-	
8.	PHP dan Cpanel	75	100	X	X	X	-	-	
9.	Risk Assesment ITC	75	100	-	X	X	X	-	
10.	Security Assesment	75	100	-	-	X	X	X	
11.	Simulasi Accident	75	100	-	-	-	X	X	
12.	Cloud computing	75	100	-	-	X	X	X	
	JUMLAH	900	1.200	6	9	11	7	4	

2. Pemanfaatan Data Center

Indikator Kinerja : Data Center

Target Kinerja :

Kondisi Data Center saat ini masih merupakan Data Center yang terbagi bagi di SKPD, belum merupakan data center yang terintegrasi karena hanya dimanfaatkan oleh 45 SKPD saja, kedepan semua sarana prasarana telematika telah terintegrasi di dalam Data Center Provinsi Jawa Timur. Untuk menjangkau misi tersebut diperlukan pengembangan data center dengan indikator kegiatan jumlah hosting- colocation, jumlah perangkat keras dan lunak sebagai berikut :

No	Sub-Kegiatan	Biaya (Jt)	Tahun					Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Jasa Hosting Colocation	360	X	X	X	X	X	
2.	Sewa Space VPS LN		X	X	X	X	X	
3.	Pengadaan mail server		X	-	-	-	-	
4.	Pengadaan Storage server		X	-	-	-	-	
5.	Pengadaan Switch L3, KVM, RAM, HD, Controller		X	-	X	X	X	
6.	Penambahan Blade Server		X	-	-	-	-	
7.	Pengadaan UPS datacenter		-	X	-	X	X	
8.	Pengadaan Rak datacenter		-	X	X	X	-	
9.	Pengadaan Door Acces Control dan CCTV		-	-	X	-	-	
10.	Pengembangan SMS		X	X	X	-	-	

No	Sub-Kegiatan	Biaya (Jt)	Tahun					Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019	
11.	Pengembangan email PNS berlisensi		X	X	X	X	X	
12.	Belanja Jasa Perijinan		X	X	X	X	X	
13.	Pengembangan Web Layanan TIK		X	X	X	-	-	
14.	Pengembangan Back-up Data Center		-	X	X	X	-	
15.	Pengembangan sistem manajemen akses data center		-	-	X	X	X	

Beberapa aplikasi yang perlu segera diintegrasikan antara lain:

- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
- Aplikasi e-Office/SMS
- Aplikasi Pendidikan
- Aplikasi Kesehatan
- Aplikasi ekonomi keuangan daerah
- Aplikasi Pemerintahan Umum.

3. **Pemeliharaan Keamanan Sistem Informasi**

Indikator Kinerja : Jumlah Pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak

Target Kinerja :

Pemeliharaan dan pengelolaan keamanan sistem informasi dapat dilakukan melalui pendekatan tata kelola dan teknologi keamanan informasi, yang dalam hal ini pendekatan dilakukan melalui sistem manajemen keamanan informasi serta melalui pendekatan teknologi yang cermat dan akurat serta up to date agar dapat menutup setiap lubang atau celah yang dapat digunakan untuk melakukan penyerangan-penyerangan dalam dunia maya. Kedua, pendekatan hukum yaitu tersedianya instrumen hukum positif nasional yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang salah satunya adalah kebijakan dan regulasi di bidang keamanan informasi yang akan diterjemahkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Adapun dalam pendekatan tata kelola dilakukan melalui beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

No	Sub-Kegiatan	Biaya (Jt)	Tahun					Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019	
1.	maintenance server farm	360	X	X	X	X	X	
2.	maintenance webhosting & VPS		X	X	X	X	X	
3.	maintenance mail server		X	X	X	X	X	
4.	pre-assesment keamanan TIK		X	-	-	-	-	
5.	Fail-over sistem keamanan TIK		X	X	-	-	-	
6.	Penyusunan manajemen sistem keamanan TIK		X	X	-	-	-	
7.	Implementasi SIM Keamanan Informasi		X	X	X	X	X	

7. PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

Indikator Program : Jumlah pemeliharaan jaringan TIK SKPD Prov. Jatim

Target Kinerja : Capaian kinerja bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK ditargetkandari mulai Tahun 2015 s/d 2019 kegiatan antara lain :

1. Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK

Kegiatan ini merupakan pengembangan jaringan internet khususnya pada daerah yang memiliki potensi namun terisolir sehingga tidak ada akses internet. Kegiatan ini muncul berdasarkan keluhan dari beberapa daerah yang daerah tidak dapat dijangkau oleh provider sehingga merupakan tugas pemerintah untuk meminimalkan kesenjangan khususnya pada bidang teknologi informasi.

Indikator Kinerja : Jumlah akses internet pada lokasi kosong (blank spot)

Target Kinerja :

Kegiatan ini akan dimulai pada tahun 2015. Setiap tahunnya ditargetkan 1 (satu) daerah blankspot dapat terkoneksi dengan internet. Dengan target tersebut, pada akhir tahun 2019 diharapkan sudah ada 5 (lima) daerah blankspot yang sudah terkoneksi dengan internet.

Capaian Kinerja :

- a. Melakukan pendataan serta analisa daerah blankspot.
- b. Pembangunan infrastruktur pendukungnya antara lain:
 - BTS (*Base Transceiver Station*) Triangle 2 unit setinggi 30 meter
 - 1 paket WYMAX yang terdiri atas 5 peralatan pendukung antara lain NPU, AU, PIU, AVU dan PSU

2. Kegiatan Fasilitas Penyediaan dan Pengembangan Jaringan TIK

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah SKPD dengan jaringan intranet

Target Kinerja Kegiatan :

Pada tahun 2015 target untuk pengembangan jaringan intranet adalah 4 (empat) SKPD. Begitu juga untuk tahun 2016 hingga 2019, target tiap tahunnya adalah 4 (empat) SKPD sehingga di akhir tahun 2019, jumlah SKPD yang terkoneksi dalam intranet Pemprov Jatim sebanyak 52 SKPD.

Capaian Kinerja :

Terintegrasinya SKPD ke dalam jaringan intranet Pemprov Jawa Timur. Pada tahun 2013 jumlah SKPD yang terkoneksi dalam jaringan intranet sebanyak 32 (tiga puluh dua) SKPD. Selain itu juga memfasilitasi jaringan internet yang sifatnya insidentil / sementara untuk pendukung kegiatan lain seperti KIM, telecenter atau pameran.

3. Pengendalian Bandwidth dan Monitoring Jaringan TIK

Indikator Kinerja : Jumlah bandwidth yang dikelola

Target Kinerja :

Target untuk kegiatan ini mengikuti target dari kegiatan Fasilitasi Penyediaan dan Pengembangan Jaringan TIK. Dengan alokasi bandwidth tiap SKPD adalah 2 MB, maka penambahan untuk bandwidth tiap tahunnya adalah 8 MB sehingga di akhir 2019 nantinya total bandwidth yang dikelola sebanyak 104 MB. Untuk Bimtek, target setiap tahunnya tetap akan dilaksanakan 2 (dua) kali.

Capaian Kinerja :

Optimalnya jumlah bandwidth yang ada beserta pengelolaannya sehingga benar-benar dapat mendukung kinerja SKPD. Pada tahun 2013, jumlah keseluruhan bandwidth dari 32 SKPD yang dikendalikan dan dimonitor sebesar 64 MB. Selain itu untuk meningkatkan kualitas dari operator jaringan TIK, secara berkala akan dilakukan Bimtek dimana untuk tahun 2013 Bimtek diadakan 2 (dua) kali.

4. Pemeliharaan Jaringan TIK dan Perangkat Keras

Indikator Kinerja : Jumlah pemeliharaan jaringan TIK SKPD

Target Kinerja :

Target untuk kegiatan ini antara 2015 – 2019 adalah 100 (*seratus*) kali kunjungan pemeliharaan setiap tahunnya.

Capaian Kinerja:

Optimalnya perangkat jaringan di SKPD Pemprov Jawa Timur sehingga gangguan masalah jaringan di SKPD dapat ditekan. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pemeliharaan (*maintenance*) berkala di SKPD serta panggilan insidentil dari SKPD yang mengalami gangguan perihal jaringannya dimana akan dilakukan pemeriksaan serta penggantian peralatan yang sekiranya dapat dilakukan. Selain itu jika diperlukan, juga dimungkinkan pemberian saran kepada SKPD perihal pengembangan ataupun solusi lain perihal jaringan di SKPD. Untuk kondisi saat ini, pemeliharaan secara berkala di SKPD dilakukan 100 (*seratus*) kali per tahun.

8. PROGRAM POS DAN TELEKOMUNIKASI

Indikator Program : Jumlah izin penyelenggaraan pos

Target Kinerja : Capaian Kinerja Bidang Pos dan Telekomunikasi dari Tahun 2015 s/d 2019 adalah 140 Penyelenggara Pos/Jasa Titipan yang berizin dan 79 Rekomendasi Penyelenggara Penyiaran TV yang diuraikan melalui 3 kegiatan, antara lain :

1. Pengendalian dan pengawasan bidang pos dan telekomunikasi

Indikator Kinerja : Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi

Target Kinerja : Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi di Jawa Timur.

Uraian Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban kepada penyelenggaraan pos kantor cabang dan terhadap menara telekomunikasi sebanyak 12 kali di Tahun 2015; 12 kali di tahun 2016; 12 kali ditahun 2017; 12 di tahun 2018 dan 12 ditahun 2019.
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pos kantor cabang dan menara telekomunikasi yang telah dipergunakan secara bersama sebanyak 2 kali di tahun 2015; 2 kali ditahun 2016; 2 kali ditahun 2017; 2 kali ditahun 2018; dan 2 kali ditahun 2019.

Capaian Kinerja :

Dengan adanya Pengawasan dan Penertiban, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pos kantor cabang di Tahun 2015 sebanyak 12mulai tahun 2015 sampai dengan ditahun 2019 diharapkan adanya penurunan pelanggaran penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi di Jawa Timur.

2. Pembinaan Bidang Pos dan Filateli

Indikator Kinerja : Jumlah bintek, FGD, monev penyelenggaraan bidang pos dan filateli pemula

Target Kinerja : Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada para penyelenggara Pos di Jawa Timur.

Uraian Kegiatan :

- a. Melakukan Bimbingan Teknis kepada penyelenggara Pos sebanyak 2 kali kegiatan ditahun 2015; 2 kali kegiatan ditahun 2016; 2 kali kegiatan ditahun 2017; 2 kali kegiatan ditahun 2018; dan 3 kali kegiatan ditahun 2019.
- b. Pemberian izin kepada penyelenggara pos sebanyak 5 izin ditahun 2015; 10 izin ditahun 2016; 10 izin ditahun 2017; 13 izin ditahun 2018; dan 15 izin ditahun 2019.
- c. Jumlah Bimbingan Teknis penggemar filateli untuk tingkat pemula sebanyak 2 kali kegiatan ditahun 2015; 2 kali kegiatan ditahun 2016; 2 kali kegiatan ditahun 2017; 2 kali kegiatan ditahun 2018; dan 3 kali kegiatan ditahun 2019.

Capaian Kinerja :

Dengan adanya peningkatan kinerja untuk perizinan ditahun 2015 sebanyak 95 izin menjadi 140 izin ditahun 2019 diharapkan tercipta tertib administrasi dan persaingan sehat diantara penyelenggara pos di Jawa Timur.

3. Pembinaan Bidang Telekomunikasi

Indikator Kinerja : Jumlah bintek, FGD, monev telekomunikasi khusus

Target Kinerja : Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada para penyelenggara telekomunikasi khusus di Jawa Timur.

Uraian Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Telekomunikasi Khusus sebanyak 2 kali kegiatan ditahun 2015; 2 kali kegiatan ditahun 2016; 2 kali kegiatan ditahun 2017; 2 kali kegiatan ditahun 2018; dan 2 kali kegiatan ditahun 2019.
- b. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Standar Telekomunikasi Radio kepada para anggota Organisasi Amatir Radio dan KRAP sebanyak 2 kali kegiatan ditahun 2015; 2 kali kegiatan ditahun 2016; 2 kali kegiatan ditahun 2017; 2 kali kegiatan ditahun 2018; dan 2 kali kegiatan ditahun 2019.
- c. Pemberian rekomendasi kelengkapan data administrasi dan aspek teknis lembaga penyiaran TV sebanyak 7 rekomendasi di tahun 2015; 9 rekomendasi di tahun 2016; 10 rekomendasi ditahun 2017; 11 rekomendasi ditahun 2018; dan 13 rekomendasi ditahun 2019.

Capaian Kinerja :

Diharapkan dengan peningkatan capaian kinerja penerbitan rekomendasi kelengkapan data administrasi dan aspek teknis lembaga penyiaran TV sebanyak 36 rekomendasi ditahun 2015 menjadi 79 rekomendasi ditahun 2019, dan terlaksananya Bimbingan teknis tetsus sebanyak 2 kali kegiatan ditahun 2019 diharapkan dapat terciptanya tertib administrasi perizinan penyelenggaraan penyiaran TV di era Digitalisasi penyiaran di Jawa Timur serta terlaksananya tata tertib berkomunikasi di masyarakat.

9. PROGRAM PENINGKATAN DISEMINASI DAN INFORMASI

Indikator Program : Jumlah Layanan Informasi yang diberikan kepada masyarakat
Target Kinerja : Capaian kinerja bidang Diseminasi Informasi ditargetkan dari mulai tahun 2015 s/d 2019 adalah 40 s/d 53 layanan yang diuraikan melalui tiga kegiatan antara lain :

1. Penyebarluasan Informasi melalui Media

Indikator Kinerja : Jumlah penyebaran informasi

Target Kinerja :

Pada tahun 2015 penyebarluasan informasi dilakukan dalam 12 jenis kegiatan, tahun 2016 dilakukan dalam 13 jenis kegiatan, tahun 2017 ditargetkan 14

jenis kegiatan, tahun 2018 ditargetkan 15 jenis kegiatan, dan pada tahun 2019 atau akhir periode RPJMD ditargetkan 16 jenis kegiatan. Dengan adanya peningkatan capaian kinerja dari 12 jenis menjadi 16 jenis kegiatan, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap program kegiatan Pemprov Jatim melalui penyebaran informasi akan meningkat dan masyarakat semakin melek informasi.

Capaian Kinerja :

Penyebarluasan informasi melalui 12 jenis kegiatan, yakni melalui Televisi, Radio, ILM, website www.jatimprov.go.id dan <http://kominfo.jatimprov.go.id>, Majalah Potensi, Majalah Galeria, Leaflet, Baliho, Spanduk, Umbul-Umbul, Banner, dan Balon Udara.

Dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Televisi berupa perbincangan sebanyak 14 kali, obrolan isu publik sebanyak 12 kali, ILM (IKlan Layanan Masyarakat) sebanyak 12 kali
- b. Radio berupa dialog interaktif sebanyak 22 kali dan perbincangan Warung Pakde sebanyak 12 kali
- c. Website www.jatimprov.go.id dan <http://kominfo.jatimprov.go.id> melalui kegiatan Jatim Online/JNR yang melibatkan 17 reporter dengan menghasilkan 5.280 berita per tahun serta diemail ke 203 media di Jawa Timur
- d. Majalah Potensi yang dicetak sebanyak 6.000 eksemplar per tahun dan didistribusikan ke SKPD Provinsi, DPRD, PemKab/Ko, Dinas Kominfo Kab/Ko, dan Telecenter se Jatim.
- e. Majalah Galeria yang terbit enam kali dalam setahun dan didistribusikan SKPD Provinsi, dan PemKab/Ko
- f. Leaflet dicetak 2.000 eksemplar untuk materi pameran
- g. Baliho, Spanduk, Umbul-Umbul, Banner, dan Balon Udara untuk mempublikasikan semua kegiatan peringatan Hari Hari Besar Nasional, kegiatan khusus Pemprov Jatim, serta kegiatan insidental.
- h. Direncanakan, hingga tahun 2019 Bidang Diseminasi Informasi akan menambah beberapa jenis kegiatan diantaranya : Warta Praja, Radio Streaming dan Multi Media Center (MMC).

2. Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

Indikator Kinerja : Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat

Target Kinerja :

Terwadahnya pengaduan masyarakat melalui kegiatan Ajang Wadul di TVRI Jawa Timur setiap hari Senin minggu kesatu dan ketiga setiap bulan. pada Tahun 2013, data yang dihimpun terdapat 867 buah pengaduan, semuanya sudah ditindak lanjuti.

Capaian Kinerja :

Pengaduan masyarakat yang terhimpun melalui email, surat, sms dan telepon dalam satu tahun berkisar 850 hingga 900. Semua pengaduan tersebut langsung ditindaklanjuti ke dinas instansi terkait, sesuai maksud pengaduan masyarakat. Dengan semakin banyaknya ruang pengaduan bagi masyarakat, maka akan semakin banyak program Pemprov Jatim yang tersosialisasikan/ tersampaikan sehingga pemahaman masyarakat semakin bertambah. Kedua masyarakat punya kesempatan banyak untuk menyampaikan aspirasinya.

3. Penguatan PPID

Indikator Kinerja : Jumlah pembinaan PPID pada SKPD Provinsi dan Kab/Ko

Target Kinerja :

Pada tahun 2015 target pembinaan PPID sebanyak 4 kali, tahun 2016 ditargetkan sebanyak 5 kali, tahun 2017 ditargetkan sebanyak 6 kali, tahun 2018 ditargetkan sebanyak 6 kali, dan pada tahun 2019 atau akhir periode RPJMD ditargetkan sebanyak 6 kali.

Dengan semakin banyaknya kegiatan pembinaan, penguatan badan publik akan semakin meningkat, baik dari sisi SDM maupun sarana prasarana. Namun karena anggaran tidak mencukupi, maka kegiatan pembinaan PPID tidak bisa maksimal.

Capaian Kinerja :

Sejak adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), berarti setiap badan publik wajib membentuk PPID di satuan kerjanya. Perkembangan PPID Pembantu/SKPD di lingkungan Pemerintah Prov. Jatim hingga

tahun 2013 dari 60 SKPD semuanya sudah membentuk/menunjuk PPID, sedangkan untuk 38 kabupaten/kota se Jawa Timur hingga Desember 2013 yang sudah membentuk PPID 36 Kabupaten/Kota, dan 2 Kab/Kota (Kabupaten Kediri dan Kota Kediri) masih dalam proses.

Kegiatan pembinaan PPID pada SKPD Provinsi dan Kab/Ko meliputi sosialisasi, bimbingan teknis, rapat koordinasi, dan Focus Group Discussion (FGD), monitoring evaluasi, dan asistensi.

10. PROGRAM FASILITASI KOMISI INFORMASI PROVINSI

Indikator Kinerja : Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat terhadap sengketa informasi

Target Kinerja : Capaian kinerja program Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tahun 2015 s/d 2019 adalah 399 kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penanganan Sengketa Informasi Publik

Indikator Kinerja : Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa informasi publik

Target Kinerja :

Target asumsi permohonan sengketa yang masuk di Komisi Informasi dari tahun 2015 – 2019 adalah 1.405 kasus, asumsi rata-rata permohonan penyelesaian sengketa informasi adalah 281 permohonan.

Capaian Kinerja :

Capaian kinerja permohonan sengketa informasi publik dari tahun 2015 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan permohonan sengketa karena diasumsikan masyarakat sebagai Pemohon informasi publik akan menggunakan haknya sebagai pemohon informasi dan Badan Publik sebagai Termohon masih melakukan pembenahan dalam pelayanan informasi publik.

Pada tahun 2017 permohonan sengketa diasumsikan mengalami penurunan karena Badan Publik telah menjalankan Keterbukaan Informasi dengan baik.

2. PPID Award SKPD / Kab/Kota se-Jatim

Indikator Kinerja : Jumlah pemenang SKPD / Kab/Kota se-Jatim

Target Kinerja :

Target Kinerja dalam PPID Award adalah diberikannya 87 award kepada SKPD dan Kab/Kota se-Jatim.

Capaian Kinerja :

Capaian kinerja dalam PPID Award ini diharapkan tingkat kepatuhan SKPD/ Kab/Kota se-Jatim terhadap implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik semakin spesifik sesuai Pasal 9 dan Pasal 11 UU KIP antara lain :

- Laporan Tahunan Badan Publik
- Desk Layanan Informasi
- Kinerja PPID dalam mengelola dan melayani
- Uji Konsekuensi

3. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik

Indikator Kinerja : Jumlah monev, bintek, sosialisasi, forum koordinasi, right to know day terhadap keterbukaan informasi publik

Target Kinerja :

Jumlah kegiatan dari tahun 2015 – 2019 adalah 329 kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan Badan Publik terhadap keterbukaan informasi publik.

Capaian Kinerja :

Capaian kinerja pada kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat sebagai pengguna informasi dan Badan Publik sebagai penyedia informasi publik, melalui kegiatan : monev, bintek, forum koordinasi, seminar, diskusi grup terfokus, dialog interaktif, iklan layanan masyarakat, right to know day, pers gathering, pemeliharaan gedung & laboratorium.

4. Prosedur Layanan Informasi

Indikator Kinerja : Jumlah pembuatan petunjuk layanan dan petunjuk teknis

Target Kinerja :

Jumlah juklak dan juknis yang dapat dihasilkan oleh Komisi Informasi Provinsi adalah 24 buah, seperti SOP, DSI (daftar status informasi), serta PPSIP (prosedur penyelesaian sengketa informasi publik)

Capaian Kinerja :

Capaian kinerja pada kegiatan ini adalah memberikan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada Badan Publik dan masyarakat pengguna informasi.

5. Pelaksanaan Forum Informasi dan Akuntabilitas (FIA)

Indikator Kinerja: Jumlah pelaksanaan Forum Informasi dan Akuntabilitas (FIA).

Target Kinerja : Jumlah FIA yang dilaksanakan dari tahun 2015 – 2019 adalah 5 kali kegiatan.

Capaian Kinerja : Capaian kinerja pada kegiatan ini adalah memberi laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada DPRD dan Gubernur, sesuai dengan Pasal 28 ayat (2), serta kepada publik baik kepada SKPD/Kab/Kota dan masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan saran dan kritik demi kemajuan kinerja Komisi Informasi.

11. PROGRAM PENGELOLAAN JARINGAN KOMUNIKASI

Indikator Program : Jumlah Lembaga Komunikasi dan Informasi yang diberdayakan

Target Kinerja : Capaian kinerja bidang Jaringan Komunikasi ditargetkan dari mulai Tahun 2015 – 2019 adalah 104 kali kegiatan, 120 dokumen dan 1185 kelompok komunikasi dan informasi yang diberdayakan dengan uraian sebagai berikut:

1. Manajemen Issue Publik

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen Issue Aktual

Target Kinerja :

Setiap tahun mulai dari tahun 2015 – 2019, melalui program fasilitasi isu aktual secara rutin menerbitkan dokumen kajian isu aktual sebanyak dua kali

sebulan sehingga setiap tahun dihasilkan 24 dokumen kajian isu aktual. Dengan demikian hingga akhir 2019, akan terbit sebanyak 120 dokumen kajian isu aktual dalam waktu 5 tahun.

Capaian Kinerja :

Fasilitasi Isu Aktual ini berupa kajian teoritis dan akademis berkenaan dengan kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Jawa Timur utama yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kajian teoritis dan akademis tersebut berupa dokumen tertulis mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah dianalisis secara mendalam untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam menentukan kebijakan berikutnya.

2. Pemberdayaan Lembaga Kehumasan Pemerintah/Bakohumas

Indikator Kinerja : Jumlah forum Bakohumas Provinsi Jawa Timur

Target Kinerja :

Pada tahun 2015 pertemuan Bakohumas ditargetkan 4 kali dan kemudian akan bertambah secara bertahap setiap tahun yaitu 6 kali di tahun 2016, 8 kali di tahun 2017, 10 kali di tahun 2018 dan 12 kali di tahun 2019 atau pada akhir periode RPJMD. Peningkatan jumlah pertemuan setiap tahun diharapkan mampu menambah kompetensi dan meningkatkan pengetahuan anggota Bakohumas Provinsi Jawa Timur tentang isu-isu publik terkini.

Capaian Kinerja :

Pemberdayaan Lembaga Kehumasan Pemerintah ini berupa pertemuan-pertemuan yang diadakan Bakohumas Provinsi Jawa Timur yang menghimpun seluruh humas instansi pemerintah/BUMN/BUMD yang berada dalam lingkup wilayah kerja Se-Provinsi Jawa Timur. Pertemuan-pertemuan yang diinisiasi oleh Bakohumas Provinsi Jawa Timur ini dapat berupa pertemuan rutin yang membahas isu-isu terkini tentang kehumasan dan kebijakan publik atau pertemuan lain yang bertujuan untuk menambah kompetensi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) anggota Bakohumas Provinsi Jawa Timur.

3. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Kelompok Informasi Masyarakat dan Media Tradisional

Indikator Kinerja : Jumlah lembaga komunikasi sosial yang diberdayakan

Target Kinerja :

Target capaian kinerja dalam program ini bukan pada jumlah kegiatan yang akan dikerjakan namun lebih pada jumlah anggota kelompok sosial yang mampu untuk diberdayakan. Secara umum, akan meningkat setiap tahun secara bertahap dan fokus akan bergantian antara KIM dan Pertura. Pada tahun 2015 ditargetkan ada 75 KIM dan 75 Pertura yang diberdayakan, pada tahun 2016 ditargetkan naik menjadi 100 KIM dan Pertura tetap 75 kelompok. Pada tahun 2017 KIM tetap pada target 100 kelompok dan Pertura naik menjadi 100 kelompok. Pada tahun 2018 KIM naik menjadi 110 kelompok dan Pertura tetap 100 kelompok. Sedangkan pada tahun 2019, giliran Pertura yang akan naik menjadi 110 kelompok dan KIM tetap di target 110 kelompok. Sehingga pada akhir RPJMD 2014 – 2019 akan terwujud 495 KIM dan 460 Pertura yang berhasil diberdayakan.

Capaian Kinerja :

Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Media Tradisional atau biasa juga dikenal sebagai Pertunjukan Rakyat (Pertura) pada rentang lima tahun kedepan lebih menitikberatkan pada jumlah masing-masing kelompok baik KIM atau pun Pertura yang berhasil diberdayakan. Program pemberdayaan dua kelompok komunikasi sosial ini akan terwujud dalam berbagai kegiatan yang secara garis besar akan dibagi dalam termin dua tahunan.

Untuk tahun genap akan berfokus pada program pembinaan seperti workshop, temu wicara, pengembangan model kegiatan dan berbagai bentuk pembinaan lainnya. Sedangkan pada tahun ganjil perhatian akan lebih besar pada pembangunan jejaring antar kelompok sosial ini seperti melalui pemantapan jejaring antar-blog KIM, rangkaian kegiatan yang mempertemukan seluruh anggota KIM dalam Pekan KIM Jawa Timur dan kompetisi antar Pertura dalam Festival Pertunjukan Rakyat Tingkat Provinsi.

4. Pengelolaan Kemitraan Media dan Lembaga Profesi Komunikasi dan Informasi

Indikator : Jumlah workshop dan seminar bagi lembaga profesi komunikasi dan informasi

Target Kinerja :

Secara umum setiap tahun hingga akhir RPJMD akan ada peningkatan volume kegiatan untuk memfasilitasi lembaga konsumen media dan lembaga profesi. Pada tahun 2015 ada 2 kegiatan masing-masing bagi lembaga konsumen media dan lembaga profesi. Setiap tahun naik satu kali pada tiap kegiatan yaitu 3 kegiatan pada tahun 2016 untuk lembaga konsumen media dan lembaga profesi, 4 kegiatan pada tahun 2017, 5 kegiatan pada tahun 2018 dan akhirnya 6 kegiatan untuk masing-masing lembaga pada tahun 2019 atau diakhir RPJMD.

Capaian Kinerja :

Facilitasi Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi merupakan bentuk program baru setelah pada tahun-tahun sebelumnya tidak hadir dalam program kegiatan Dinas Kominfo Prov. Jatim. Program ini secara umum bertujuan untuk membina hubungan strategis antara Dinas Kominfo sebagai instrumen pemerintah dengan stakeholder lain dalam dunia komunikasi dan informasi. Dua sasaran utama dalam program ini adalah lembaga konsumen media dan lembaga profesi komunikasi dan informasi. Untuk lembaga konsumen media fokus utama akan dititikberatkan pada workshop untuk meningkatkan kualitas pemantauan media dan teknik mengonsumsi media secara cerdas. Sedangkan untuk lembaga profesi akan difasilitasi melalui seminar pers untuk menampung ide-ide dan memecahkan permasalahan bersama yang ada pada lembaga profesi komunikasi dan informasi.

TABEL
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF (terlampir)

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Prov. Jatim sebagai corong semua informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam 5 tahun ke depan memiliki posisi yang strategis dalam penyebaran informasi.

Penyebarluasan informasi tidak saja melalui media yang ada disekitar kita namun juga melalui website sebagai pelayanan publik TIK yang terus menerus berkembang sesuai dengan arah kemajuan zaman. Tidak bisa dipungkiri pelayanan publik melalui TIK saat ini sebagai kebutuhan vital dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penyelenggaraan pemerintah menyesuaikan dengan perkembangan TIK sehingga kemajuan suatu pemerintah daerah akan dituntut juga penggunaan TIK dalam kegiatan pada masing-masing SKPD.

Sejalan dengan tupoksi Dinas Kominfo Prov. Jatim maka komitmen yang dicapai sebagai indikator kinerja SKPD meliputi 2 hal yaitu : penyebaran informasi dan jaringan komunikasi publik, fasilitasi pelayanan publik melalui TIK yang secara rinci seperti tabel dibawah ini.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Kominfo Prov. Jatim
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2014	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase penurunan pengaduan	-	12,1%	13,8%	16%	19%	23,5%	23,5%
2.	Prosentase tindak lanjut sengketa informasi	-	91%	90%	87%	86%	83%	83%
3.	Persentase pemberdayaan aparatur dan masyarakat yang paham TIK	-	80%	87%	87%	89%	90%	90%
4.	Persentase pemanfaatan hosting dan collocation		47%	67%	71%	76%	80%	80%
5.	Persentase SKPD, UPT, Lembaga Non Struktural dan Kab/Kota yang memiliki website sesuai standar muatan TIK	-	40%	50%	60%	70%	80%	80%
6.	Penilaian Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGi) tingkat Provinsi	-	2,92	2,95	2,98	3,01	3,04	3,04
7.	Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengupload data terkini	-	-	3,15 jam	3 jam	2,45 jam	2,30 jam	2,30 jam
8.	Persentase penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	-	49%	55%	64%	69%	71%	71%

Pada indikator sasaran menunjukkan persentase kenaikan pada tiap tahun disebabkan karena kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dalam menyebarluaskan informasi semakin meningkat dan dibutuhkan oleh masyarakat akan informasi kebijakan pemerintah yang dijalankan. Masyarakat dalam perkembangannya semakin kritis dalam menyikapi kebijakan atas penyelenggaraan pemerintah untuk memantau dan mengawasi kinerja para penyelenggara pemerintah sehingga dengan penyebaran informasi akan semakin mengetahui program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keterlibatan partisipasi masyarakat selalu dilibatkan dalam memberikan masukan penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja maupun kebijakan sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan penyelenggara

pemerintahan daerah. Masyarakat semakin hari selalu membutuhkan informasi yang up to date sehingga peran Dinas Kominfo Prov. Jatim semakin dituntut menyediakan informasi setiap saat dalam penyebarluasan informasi yang telah menjadi suatu kebutuhan pokok untuk masyarakat. Bahkan informasi diibaratkan sebagai bahan promosi yang akurat dari suatu badan publik untuk meningkatkan produktivitas dalam mencapai tujuan.

BAB VII

P E N U T U P

Review Renstra Dinas Kominfo Prov. Jatim tahun 2014 – 2019 merupakan rencana tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan dalam kurun waktu lima tahun untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibidang komunikasi dan infomatika.

Review Renstra hanyalah dokumen perencanaan, sebagai apapun isi dari Review Renstra tidak akan mampu merubah Dinas Kominfo menjadi SKPD yang hebat dan berhasil mewujudkan visi dan misinya tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur Dinas Kominfo untuk menerapkannya. Menjadi sangat penting untuk diikrarkan oleh kita semua jajaran Dinas Kominfo, bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam Review Renstra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Review Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Akhir kata, semoga Review Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka terwujudnya good governance guna menuju terwujudnya masyarakat informasi Jawa Timur yang mandiri dan beretika melalui komunikasi dan informatika.